



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Bogor



BAB I

PENDAHULUAN

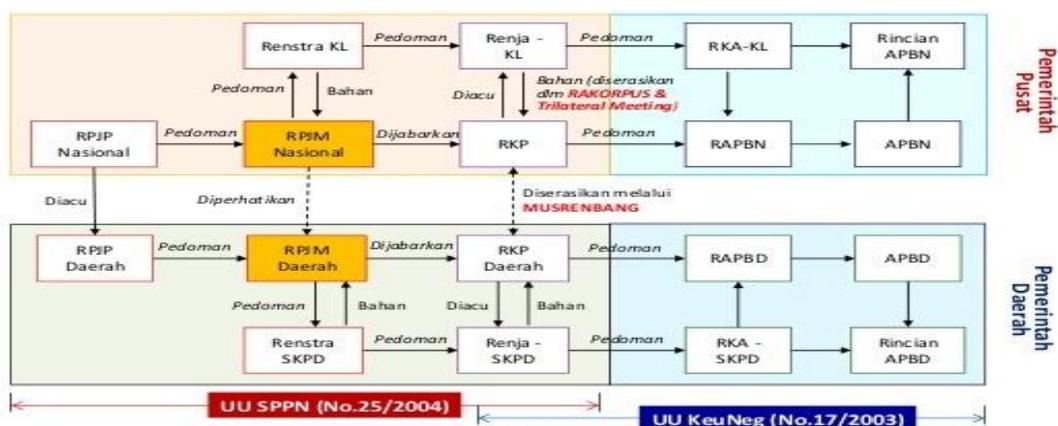
1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan Dinas untuk sisa periode tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Perubahan Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bogor sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2024 disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Selanjutnya Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Diskominfo Kota Bogor tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019));
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (5/49/2022));

25. Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 42).
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada sisa periode Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2024 adalah :

1. Mengakomodir perubahan yang terjadi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan organisasi berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.
2. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
4. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2024 pada akhir tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Diskominfo Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra

Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Diskominfo, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal perubahan dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Bogor.

Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, total pagu anggaran murni pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor berjumlah Rp. 19.610.698.595,- (sebilan belas milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Jumlah anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran untuk pengadaan bandwith yang baru dianggarkan 2/3 dari kebutuhan setahun dan layanan kehumasan yang baru dianggarkan 1/3 dari kebutuhan setahun. Sehingga pada pergeseran anggaran di triwulan pertama tahun 2024, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor mendapatkan tambahan anggaran untuk sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan sebesar Rp. 992.250.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sub kegiatan Layanan hubungan Media sebesar Rp. 1.947.940.000,- (satu milyar sembilan ratus empat pulu tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total penambahan sebesar Rp. 2.940.190.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 22.550.888.595,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas komunikasi dan Informatilka Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Triwulan II Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|--|--------|---|--|--|---------------------------------|------|----------------|----------------|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|-------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | | | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | Nilai | A | 8.349.600 | 8.349.600 | | | - | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | | | Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat | Point | 3,55 | 14.675.152.104 | 14.675.152.104 | | | 4.149.548.183 | | 4.199.533.518 | | 8.349.081.701 | | - | 56,89 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | Nilai | A | 8.349.600 | 8.349.600 | | | - | | - | | - | | | |
| 6 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 00 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 8.349.600 | 8.349.600 | | | - | | - | | - | | - | |
| 6 | 1 | | 1 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 11.750.141.043 | 11.750.141.043 | 25 | 3.307.897.640 | | 3.482.559.715 | 25 | 6.790.457.355 | 25,00 | 57,79 | | |
| 6 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 59 | 11.685.353.043 | 11.685.353.043 | 59 | 3.294.027.640 | 59 | 3469779715 | 118 | 6.763.807.355 | 200,00 | 57,88 | | |
| 6 | 1 | | 2 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | 12 | 64.788.000 | 64.788.000 | 3 | 13.870.000 | 3 | 12.780.000 | 6 | 26.650.000 | 50,00 | 41,13 | | |
| 6 | 1 | | 2 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah | % | 100 | 317.067.700 | 317.067.700 | 25 | 141.627.970 | | 50.100.951 | 25 | 191.728.921 | 25,00 | 60,47 | | |
| 6 | 1 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6.119.200 | 6.119.200 | | 1.511.000 | | 1.530.000 | - | 3.041.000 | - | 49,70 | | |
| 6 | 1 | | 6 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | |
|--|---|--|---------|---|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|---|---------------|--|-------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | |
| 2 6 1 0 2.0 6 00 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 95.305.700 | 95.305.700 | | 23.999.000 | | 21.468.824 | - | 45.467.824 | - | 47,71 |
| 2 6 1 0 2.0 6 00 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 15.072.800 | 15.072.800 | | 10.691.500 | | 1.880.000 | - | 12.571.500 | - | 83,41 |
| 2 6 1 0 2.0 6 00 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 200.570.000 | 200.570.000 | | 105.426.470 | | 25.222.127 | - | 130.648.597 | - | 65,14 |
| 2 6 1 0 2.0 7 00 07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD | % | 100 | 62.194.569 | 62.194.569 | 25 | - | | 61.466.000 | 25 | 61.466.000 | 25,00 | 98,83 |
| 2 6 1 0 2.0 7 00 06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 59.564.569 | 59.564.569 | | - | 3 | 59.528.000 | 3 | 59.528.000 | 100 | 99,94 |
| 2 6 1 0 2.0 7 00 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2.630.000 | 2.630.000 | | - | 2 | 1.938.000 | 2 | 1.938.000 | 100 | 73,69 |
| 2 6 1 0 2.0 8 00 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100 | 2.260.198.792 | 2.260.198.792 | 25 | 617.627.372 | | 526.119.352 | 25 | 1.143.746.724 | 25,00 | 50,60 |
| 2 6 1 0 2.0 8 00 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | | 802.062 | | 812.018 | - | 1.614.080 | - | 17,93 |
| 2 6 1 0 2.0 8 00 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 2.251.198.792 | 2.251.198.792 | | 616.825.310 | | 525.307.334 | - | 1.142.132.644 | - | 50,73 |
| 2 6 1 0 2.0 9 00 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD | % | 100 | 285.550.000 | 285.550.000 | 25 | 82.395.201 | | 79.287.500 | 25 | 161.682.701 | 25,00 | 56,62 |
| 2 6 1 0 2.0 9 00 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 13 | 223.340.000 | 223.340.000 | 3 | 70.605.201 | 3 | 62.037.500 | 6 | 132.642.701 | 46,15 | 59,39 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | |
|------------------------|--|---|---------|---|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|---|---------------|--|-------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | |
| 2 6 1 9 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 62.210.000 | 62.210.000 | 12 | 11.790.000 | 12 | 17.250.000 | 24 | 29.040.000 | 48,00 | 46,68 |
| 2 6 2 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi publik | Level | Cukup Informatif | 1.635.454.289 | 3.583.394.289 | | 658.578.940 | | 951.687.562 | | 1.610.266.502 | | 44,94 |
| 2 6 2 1 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | % | 100 | 953.823.600 | 2.901.763.600 | | 568.053.000 | | 772.252.600 | - | 1.340.305.600 | - | 46,19 |
| | | Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website | % | 68 | 355.506.132 | 355.506.132 | | 75.625.540 | | 139.534.012 | - | 215.159.552 | - | 60,52 |
| | | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP | % | 100 | 326.124.557 | 326.124.557 | | 14.900.400 | | 39.900.950 | - | 54.801.350 | - | 16,80 |
| | | Persentase PPID PD yang aktif | % | 100 | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2 6 2 1 05 | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 3 | 355.506.132 | 355.506.132 | 1 | 75.625.540 | | 139.534.012 | 1 | 215.159.552 | 33,33 | 60,52 |
| 2 6 2 1 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Dokumen | 1 | 326.124.557 | 326.124.557 | | 14.900.400 | | 39.900.950 | - | 54.801.350 | - | 16,80 |
| 2 6 2 1 07 | Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | Layanan | 4 | 953.823.600 | 2.901.763.600 | 4 | 568.053.000 | 4 | 772.252.600 | 8 | 1.340.305.600 | 200,00 | 46,19 |
| 2 6 3 | Program Aplikasi Informatika | Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | Indeks | 3,50 | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| | | Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE | Indeks | 3,30 | 59.067.600 | 59.067.600 | | 3.030.000 | | 5.000.000 | | 8.030.000 | - | 13,59 |
| | | Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | 3,50 | 2.381.852.402 | 3.374.102.402 | | 414.447.958 | | 1.219.144.060 | | 1.633.592.018 | - | 48,42 |
| | | Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE | Indeks | 3,00 | 422.168.700 | 422.168.700 | | 206.922.500 | | 85.626.378 | | 292.548.878 | - | 69,30 |
| 2 6 3 1 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup | Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor | % | 100 | 67.220.000 | 67.220.000 | | 280.800 | | 21.995.760 | - | 22.276.560 | - | 33,14 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung | % | 100 | 1.595.916.602 | 2.588.166.602 | | 235.830.560 | | 937.884.000 | - | 1.173.714.560 | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|--|----------|---|---|--|---------------------------------|-----|---------------|---------------|---|-------------|--|-------------|---|---------------|---|-------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | | | | | |
| | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | | | | | | | | | | - | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur | Level | 4 | | | | | | | | | | - | | | | |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 1 | 00 02 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen | 1 | 67.220.000 | 67.220.000 | | 280.800 | | 21.995.760 | - | 22.276.560 | - | 33,14 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 1 | 00 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Unit | 138 | 1.595.916.602 | 2.588.166.602 | | 235.830.560 | | 937.884.000 | - | 1.173.714.560 | - | 45,35 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | | Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peng- | Level | 4 | | | | | | | | | | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | |
|------|--|--|--------|---|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|---|-----|--|---------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | |
| | | gunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | 59.067.600 | 59.067.600 | | 3.030.000 | | 5.000.000 | | | 8.030.000 | - 13,59 |
| | | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | - | - | | - | | - | | | - | - |
| | | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | Level | 4 | | | | | | | | | | - |
| | | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | Level | 3 | 217.468.400 | 217.468.400 | | 5.520.000 | | 70.520.500 | | | 76.040.500 | - 34,97 |
| | | Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tahun | 1 | 422.168.700 | 422.168.700 | | 206.922.500 | | 85.626.378 | | | 292.548.878 | - 69,30 |
| | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | Level | 3 | 149.593.800 | 149.593.800 | | 148.872.438 | | - | | | 148.872.438 | - 99,52 |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Level | 4 | 351.653.600 | 351.653.600 | | 23.944.160 | | 188.743.800 | | | 212.687.960 | - 60,48 |
| | | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 3 | - | - | | - | | - | | | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|--|----------|---|--|--|---------------------------------|-----|-------------|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-----|--------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | |
| 1 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | Level | 4 | - | - | | | - | | | - | - | | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE | Level | 4 | - | - | | | - | | | - | - | | | | | |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 03 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Unit | 1 | 217.468.400 | 217.468.400 | | 5.520.000 | | 70.520.500 | - | 76.040.500 | - | 34,97 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 04 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 31.328.000 | 31.328.000 | | 31.328.000 | | - | - | 31.328.000 | - | 100,00 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Perangkat Daerah | 5 | 118.265.800 | 118.265.800 | | 117.544.438 | | - | - | 117.544.438 | - | 99,39 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 07 | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 1 | 351.653.600 | 351.653.600 | | 23.944.160 | 1 | 188.743.800 | 1 | 212.687.960 | 100 | 60,48 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 422.168.700 | 422.168.700 | | 206.922.500 | | 85.626.378 | - | 292.548.878 | - | 69,30 |
| 2 | 1 6 | 0 3 | 2.0 2 | 00 12 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | Dokumen | 2 | 59.067.600 | 59.067.600 | | 3.030.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.030.000 | 50 | 13,59 |
| 2 | 2 0 | | | | Bidang Urusan Statistik | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 0 | 0 2 | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | % | 84 | 174.647.500 | 174.647.500 | | 50.426.150 | | 119.115.150 | - | 169.541.300 | - | 97,08 |
| | | | | | | Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia | % | 3 | 148.351.300 | 148.351.300 | | 1.550.000 | | 45.452.759 | - | 47.002.759 | - | 31,68 |
| 2 | 2 0 | 0 2 | 2.0 1 | | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PD yang menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar | % | 84 | 73.044.000 | 73.044.000 | | - | | 68.997.000 | - | 68.997.000 | - | 94,46 |
| | | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan | % | 84 | 148.351.300 | 148.351.300 | | 1.550.000 | | 45.452.759 | - | 47.002.759 | - | 31,68 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 | | | | |
|--------|--|--|-----------------|---|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---|-------------|--|-------|----------------|-----|-------|
| | | | | K | Murni (Rp.) | Pergeseran (Rp.) | I | | II | | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 = 6 =7 | | 9= 8/5*100 | | | | |
| | | Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan, pengolahan data | Paket | 1 | 101.603.500 | 101.603.500 | | 50.426.150 | | 50.118.150 | - | 100.544.300 | - | 98,96 | | | |
| 2 | 2 0 2 | 0 2 1 | 2.0 00 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | Dokumen | 1 | 54.133.300 | 54.133.300 | | - | | - | - | - | | |
| 2 | 2 0 2 | 0 2 1 | 2.0 00 02 | Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi | Orang | 131 | 73.044.000 | 73.044.000 | | - | 117 | 68.997.000 | 117 | 68.997.000 | 89 | 94,46 |
| 2 | 2 0 2 | 0 2 1 | 2.0 00 03 | Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun | Dokumen | 1 | 94.218.000 | 94.218.000 | | 1.550.000 | | 45.452.759 | - | 47.002.759 | - | 49,89 |
| 2 | 2 0 2 | 0 2 1 | 2.0 00 05 | Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | Unit | 1 | 101.603.500 | 101.603.500 | | 50.426.150 | 1 | 50.118.150 | 1 | 100.544.300 | 100 | 98,96 |
| 2 | 2 1 | | | Bidang Urusan Persandian | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 1 | 0 2 | | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level | 2 | 105.655.100 | 105.655.100 | | 2.549.600 | | 43.720.870 | | 46.270.470 | - | 43,79 |
| 2 | 2 1 | 0 2 | 2.0 01 | Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI | % | 83 | 105.655.100 | 105.655.100 | | 2.549.600 | | 43.720.870 | - | 46.270.470 | - | 43,79 |
| | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi | Kebijakan | 1 | | | | | | | - | | - | |
| 2 | 2 1 | 0 2 | 2.0 00 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 1 | 105.655.100 | 105.655.100 | | 2.549.600 | | 43.720.870 | - | 46.270.470 | - | 43,79 |
| JUMLAH | | | | | | | | 19.610.698.595 | 22.550.888.595 | | 5.487.053.331 | | 6.669.280.297 | | 12.156.333.628 | | 53,91 |

2.2. EVALUASI KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja Triwulan II Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian sebesar 53,91% (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024

| No | Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah | Satuan | TARGET | Realisasi Capaian | Catatan Analisis |
|--|---|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| I INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) | | | | | |
| 1 | Persentase penyediaan data Statistik Sektoral | % | 85 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 2 | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level | Level 2 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah | nilai | 82 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 4 | Nilai Indeks Evaluasi SPBE | Index | 2,99 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 5 | IKM layanan pengaduan masyarakat | % | 85 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| II INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | |
| URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| 1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 2 | Hasil Penilaian SPBE | Index | 2,99 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 3 | Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi | % | 41 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 4 | Persentase Keterbukaan Informasi public | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 5 | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 6 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 7 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | % | 75,33 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |

| No | Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah | Satuan | TARGET | Realisasi Capaian | Catatan Analisis |
|------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| URUSAN STATISTIK | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | ada/tidak | Ada | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 2 | Data basis pembangunan daerah | ada/tidak | Ada | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 3 | Buku "Kota Bogor Dalam Angka" | ada/tidak | Ada | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 4 | Buku "PDRB" | ada/tidak | Ada | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 5 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 6 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| URUSAN PERSANDIAN | | | | | |
| 1 | Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah | % | 80 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 2 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 83 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| III INDIKATOR PROGRAM | | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | % | 85 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 2 | Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia | % | 0,5 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 3 | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level | Level 2 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | nilai | A | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 5 | Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah | point | 3,5 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 6 | Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | Index | 2,74 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 7 | Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE | Index | 3,3 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 8 | Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | index | 2,36 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 9 | Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE | Index | 3 | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |
| 10 | Nilai Keterbukaan Informasi publik | Level | Cukup Informatif | - | Hasil pengukuran di akhir tahun |

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

1. Penyediaan Ruang Server yang Layak;
2. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC);
3. Kurangnya SDM TIK yang kompeten;
4. Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
5. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil;
6. Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun;
7. Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral;
8. Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
9. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan;
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan Layanan Interoperabilitas;

4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
5. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi;
6. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik;
7. Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data;
8. Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.
9. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
10. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
12. Mengembangkan muatan e-Government.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.927.194.502,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah). Namun berdasarkan hasil review yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka anggaran berkurang menjadi Rp. 24.033.186.835,- (dua puluh empat milyar tiga puluh tiga juta setarus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Adapun yang mengalami pengurangan anggaran adalah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan menyesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan oleh BKPD, sub kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan menunda pembelian sarana dan prasarana Gedung, sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan menunda pembelian infrastruktur server, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan mengakomodir sebagian usulan pemeliharaan cctv disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun secara lengkap terlihat pada tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Bogor

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|---|-----------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 26.927.194.502 | | 24.033.186.835 | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | | | | 26.554.373.902 | | 23.660.366.235 | |
| 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | 3.55 Point A Poin | 16.374.365.498 | 3.55 Point A Poin | 15.693.232.210 | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | A Nilai | 8.349.600 | A Nilai | 8.349.600 | |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Diskominfo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 8.349.600 | 7 Dokumen | 8.349.600 | |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 13.199.840.037 | 100 % | 12.715.670.949 | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Diskominfo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 59 Orang/bulan | 13.147.042.037 | 59 Orang/bulan | 12.662.872.949 | Menyesuaikan dengan perhitungan kebutuhan dari BKPSDM |
| 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Diskominfo | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan | 52.798.000 | 12 Laporan | 52.798.000 | |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah | 100 % | 421.102.500 | 100 % | 364.138.300 | |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | Diskominfo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 Paket | 6.119.200 | 1 Paket | 6.119.200 | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Diskominfo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 92.265.500 | 1 Paket | 92.265.500 | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Diskominfo | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.072.800 | 1 Paket | 15.218.600 | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 307.645.000 | 1 Laporan | 250.535.000 | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD | 100 % | 201.514.569 | 100 % | 61.514.569 | |
| 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskominfo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 59.564.569 | 3 Unit | 59.564.569 | |
| 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 141.950.000 | 3 Unit | 1.950.000 | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 2.260.198.792 | 100 % | 2.260.198.792 | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 9.000.000 | 1 Laporan | 9.000.000 | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.251.198.792 | 1 Laporan | 2.251.198.792 | |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD | 100 % | 283.360.000 | 100 % | 283.360.000 | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Diskominfo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 223.340.000 | 13 Unit | 223.340.000 | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskominfo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 60.020.000 | 50 Unit | 60.020.000 | |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | Nilai Keterbukaan Informasi publik | Menuju Informatif Level | 3.553.654.289 | Menuju Informatif Level | 3.553.654.289 | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP Persentase PPID PD yang aktif | 100 % 68 % 100 % 100 % | 3.553.654.289 | 100 % 68 % 100 % 100 % | 3.553.654.289 | |
| 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 3 Dokumen | 344.226.132 | 3 Dokumen | 344.226.132 | |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 317.664.557 | 1 Dokumen | 317.664.557 | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|--|---|---|--|---------------|--|---------------|------------|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Layanan Hubungan Media | 4 Layanan | 2.891.763.600 | 4 Layanan | 2.891.763.600 | |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | Nilai aspek penerapan manajemen SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index | 6.626.354.115 | 3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index | 4.413.479.736 | |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 100 % 100 % 4 Level 4 Level | 2.936.031.802 | 100 % 100 % 4 Level 4 Level | 2.934.345.652 | |
| 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 66.540.000 | 1 Dokumen | 66.540.000 | |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 138 Unit | 2.869.491.802 | 138 Unit | 2.867.805.652 | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|---------------|--|---|---|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 Level | 3.690.322.313 | 4 Level | 1.479.134.084 | |
| | | Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data | 3 Level | 3 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE | 3 Level | 3 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 Level | 4 Level | | | | |
| | | Tingkat Kematangan Kebijakan | 4 Level | 4 Level | | | | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|---------------|---|--------------------|--|---------------------|----------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| | | | Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE | | | | | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 517.420.400 | 1 Unit | 210.208.400 | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah |
| 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 31.328.000 | 1 Dokumen | 31.328.000 | |
| 2.16.03.2.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 5 Perangkat Daerah | 2.320.452.013 | 5 Perangkat Daerah | 416.540.184 | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah |
| 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 Unit | 350.035.600 | 1 Unit | 349.971.200 | |
| 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 413.028.700 | 1 Dokumen | 413.028.700 | |
| 2.16.03.2.02.0012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 2 Dokumen | 58.057.600 | 2 Dokumen | 58.057.600 | |
| 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | 267.165.500 | | 267.165.500 | |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia) Persentase ketersediaan data statistik sektoral | 6 % 89 % | 267.165.500 | 6 % 89 % | 267.165.500 | |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar | 89 % 1 paket 89 % | 267.165.500 | 89 % 1 paket 89 % | 267.165.500 | |

| KODE KEGIATAN | BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / OUTPUT | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | KETERANGAN |
|-------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | TARGET INDIKATOR | ANGGARAN | |
| 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | |
| 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 80 Orang | 71.344.000 | 80 Orang | 71.344.000 | |
| 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 94.218.000 | 1 Dokumen | 94.218.000 | |
| 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | 101.603.500 | 1 Unit | 101.603.500 | |
| 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | | | | 105.655.100 | | 105.655.100 | |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level 2 Level | 105.655.100 | Level 2 Level | 105.655.100 | |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI | 1 Kebijakan 83 % | 105.655.100 | 1 Kebijakan 83 % | 105.655.100 | |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 105.655.100 | 1 Laporan | 105.655.100 | |
| | | | | | | | | |

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

| No | Program | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | NIHIL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuan dan Sasaran ditetapkan untuk mencapai Visi Wali Kota Bogor sebagai visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu VISI **“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”** dalam MISI yang kedua yaitu **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”**.

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Misi Kedua tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart Government)”**.

Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **“Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”** dan **“Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)”**.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Sasaran 1 : Tersedianya data statistik sektoral

Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Peningkatan kualitas smart government

Sasaran 1 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2023 semula akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, bertambah pada perubahan renja menjadi 39 sub kegiatan dengan penambahan sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi.

Adapun rincian urusan, program dan sub kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bogor

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisa Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 24.033.186.835 | | | | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | | | | 23.660.366.235 | | | | |
| 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | 3.55 Point A Poin | 15.693.232.210 | | | - | - |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | A Nilai | 8.349.600 | | | - | - |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Diskominfo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 8.349.600 | | | - | - |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 12.715.670.949 | | | - | - |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Diskominfo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 59 Orang/ bulan | 12.662.872.949 | | Menyesuaikan dengan perhitungan kebutuhan dari BKPSDM | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|---|-----------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Diskominfo | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan | 52.798.000 | | | - | - |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah | 100 % | 364.138.300 | | | - | - |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Diskominfo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.119.200 | | | - | - |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Diskominfo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 92.265.500 | | | - | - |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Diskominfo | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.218.600 | | | - | - |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 250.535.000 | | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah | - | - |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD | 100 % | 61.514.569 | | | - | - |
| 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskominfo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 59.564.569 | | | - | - |
| 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 1.950.000 | | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|---|-----------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 2.260.198.792 | | | - | - |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 9.000.000 | | | - | - |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Diskominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.251.198.792 | | | - | - |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD | 100 % | 283.360.000 | | | - | - |
| 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Diskominfo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 223.340.000 | | | - | - |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskominfo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 60.020.000 | | | - | - |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | Nilai Keterbukaan Informasi publik | Menuju Informatif Level | 3.553.654.289 | | | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP Persentase PPID PD yang aktif | 100 % 68 % 100 % 100 % | 3.553.654.289 | | | - | - |
| 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 3 Dokumen | 344.226.132 | | | - | - |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 317.664.557 | | | - | - |
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Layanan Hubungan Media | 4 Layanan | 2.891.763.600 | | | - | - |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | Nilai aspek penerapan manajemen SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3,0 Index 3,3 Index 3,7 Index 3,5 Index | 4.413.479.736 | | | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 100 % 100 % 4 Level 4 Level | 2.934.345.652 | | | - | - |
| 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 66.540.000 | | | - | - |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 138 Unit | 2.867.805.652 | | | - | - |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK | 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level | 1.479.134.084 | | | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | Penerapan Manajemen Data Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 210.208.400 | | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah | - | - |
| 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 31.328.000 | | | - | - |
| 2.16.03.2.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 5 Perangkat Daerah | 416.540.184 | | Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah | - | - |
| 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 Unit | 349.971.200 | | | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 413.028.700 | | | - | - |
| 2.16.03.2.02.0012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 2 Dokumen | 58.057.600 | | | - | - |
| 2.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | 267.165.500 | | | | |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia) Persentase ketersediaan data statistik sektoral | 6 % 89 % | 267.165.500 | | | - | - |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan, pengolahan data Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar | 89 % 1 paket 89 % | 267.165.500 | | | - | - |
| 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 0 | | | - | - |
| 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 80 Orang | 71.344.000 | | | - | - |

| Kode Kegiatan | Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja / Output | Hasil Analisis Kebutuhan | | | catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| | Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | |
| 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 94.218.000 | | | - | - |
| 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | 101.603.500 | | | - | - |
| 2.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | | | | 105.655.100 | | | | |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level 2 Level | 105.655.100 | | | - | - |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI | 1 Kebijakan 83 % | 105.655.100 | | | - | - |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota Bogor, Semua Kec, Kel/Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 105.655.100 | | | - | - |

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sama dengan Rencana Kerja semula, pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2024 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Program yang mendukung tujuan ada 4 (empat) program sedangkan 1 (satu) program sebagai pendukung. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program penyelenggaraan statistik sektoral, dan Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang direncanakan pada perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 24.033.186.835 (dua puluh empat milyar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Secara rinci, dapat dijealskan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|--|--|-------------|----------------|----------------|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 24.033.186.835 | |
| 2.16 | | | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | 23.660.366.235 | |
| 2.16 | 01 | | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | Nilai | A | 8.349.600 | |
| | | | | Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat | Point | 3,55 | 15.684.882.610 | |
| 2.16 | 01 | 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah | Nilai | A | 8.349.600 | |
| 2.16 | 01 | 2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 8.349.600 | Penyusunan dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah sebanyak 7 dokumen |
| 2.16 | 01 | 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 12.715.670.949 | |
| 2.16 | 01 | 2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 59 | 12.662.872.949 | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun |
| 2.16 | 01 | 2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen | 12 | 52.798.000 | - Penyusunan laporan keuangan bulanan sebanyak 12 laporan - Honorarium PA - Honorarium PPK SKPD - Honorarium Bendahara |
| 2.16 | 01 | 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah | % | 100 | 364.138.300 | |
| 2.16 | 01 | 2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan-an Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6.119.200 | Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|---|--|---------|----------------|---------------|--|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16 | 01 | 2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 92.265.500 | Belanja ATK dan kertas, belanja bahan komputer, belanja alat kebersihan, belanja karangan bunga, belanja air mineral galon |
| 2.16 | 01 | 2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 15.218.600 | Belanja penggandaan dan cetak |
| 2.16 | 01 | 2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 250.535.000 | Belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas biasa |
| 2.16 | 01 | 2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD | % | 100 | 61.514.569 | |
| 2.16 | 01 | 2.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 59.564.569 | Belanja laptop dan rak arsip |
| 2.16 | 01 | 2.10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 1.950.000 | Prasarana ruang media center |
| 2.16 | 01 | 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100 | 2.260.198.792 | |
| 2.16 | 01 | 2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 9.000.000 | Belanja tagihan telepon |
| 2.16 | 01 | 2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 2.251.198.792 | Belanja Honorarium Non ASN dan Belanja luran BPJS Non ASN untuk 46 orang selama 13 bulan |
| 2.16 | 01 | 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD | % | 100 | 283.360.000 | |
| 2.16 | 01 | 2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 13 | 223.340.000 | Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Pemeliharaan |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|---|---|---------|------------------|---------------|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 13 kendaraan |
| 2.16 | 01 | 2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 60.020.000 | Pemeliharaan Alat Pendingin AC, Pemeliharaan Personal Computer, Pemeliharaan Printer |
| 2.16 | 02 | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi publik | Level | Cukup Informatif | 3.553.654.289 | |
| 2.16 | 02 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | % | 100 | 2.891.763.600 | |
| | | | | Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website | % | 68 | 344.226.132 | |
| | | | | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP | % | 100 | 317.664.557 | |
| | | | | Persentase PPID PD yang aktif | % | 100 | - | |
| 2.16 | 02 | 2.01.05 | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 3 | 344.226.132 | - Pembuatan Booklet Smart City 316 buku - Pembuatan Konten Multimedia 2 kegiatan - Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kota Bogor dan Kanal Digital Sipatahunan |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|--|---|---------|----------------|---------------|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16 | 02 | 2.01.06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Dokumen | 1 | 317.664.557 | - Buku untuk Dokumen PPID/Keterbukaan Informasi Publik 315 buku - Sewa Aplikasi NTPD 112 - Penyediaan Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat - Jasa Konsultasi Pengembangan dan Perawatan Aplikasi Sibadra (Pengaduan Masyarakat) |
| 2.16 | 02 | 2.01.07 | Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media | jumlah Layanan Hubungan Media | Layanan | 4 | 2.891.763.600 | - Publikasi pada Media Cetak Lokal Halaman Berwarna 40 tayangan - Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan 3 orang 12 bulan - Publikasi pada media online nasional 60 tayangan - Kegiatan jumpa pers - Redaktur menulis - Publikasi pada Media Online Lokal Halaman Berwarna 250 tayangan |
| 2.16 | 03 | | Program Aplikasi Informatika | Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | Indeks | 3,50 | - | |
| | | | | Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE | Indeks | 3,30 | 58.057.600 | |
| | | | | Nilai aspekvTeknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | 3,50 | 3.942.393.436 | |
| | | | | Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE | Indeks | 3,00 | 413.028.700 | |
| 2.16 | 03 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub | Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor | % | 100 | 66.540.000 | |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|--|--|---------|----------------|---------------|--|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor | % | 100 | 2.867.805.652 | |
| | | | | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur | level | 4 | | |
| 2.16 | 03 | 2.01.02 | Sub Kegiatan Penatalak-sanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen | 1 | 66.540.000 | Sewa colocation server C Panel Kota Bogor dan Sub Domain Kota Bogor untuk 1 tahun |
| 2.16 | 03 | 2.01.03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Unit | 138 | 2.867.805.652 | - Pengadaan bandwidth 600 Mbps selama 12 bulan - Pengadaan perangkat alat jaringan - Pemeliharaan dan penataan jaringan internet fiber optik |
| 2.16 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | - | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data | Level | 4 | | |

| KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|--|--|--|---|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | 58.057.600 | |
| | | | | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | - | |
| | | | | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | Level | 4 | | |
| | | | | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | Level | 3 | 210.208.400 | |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|---|---|------------------|----------------|---------------|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tahun | 1 | 413.028.700 | |
| | | | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | Level | 3 | 447.868.184 | |
| | | | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Level | 4 | 349.971.200 | |
| | | | | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Level | 3 | - | |
| | | | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | Level | 4 | - | |
| | | | | Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE | Level | 4 | - | |
| 2.16 | 03 | 2.02.03 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Unit | 1 | 210.208.400 | Sewa Data Center (Collocation) 1 paket |
| 2.16 | 03 | 2.02.04 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 31.328.000 | Belanja Lisensi Zoom Meeting selama 1 tahun |
| 2.16 | 03 | 2.02.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Perangkat Daerah | 5 | 416.540.184 | Pemeliharaan CCTV Kota Bogor |
| 2.16 | 03 | 2.02.07 | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 1 | 349.971.200 | - Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor - Sewa Layanan Colocation Server Webmail - Pengembangan Super Apps Layanan Publik Kota Bogor versi Mobile - Penyediaan Layanan Whatsapp Business API - Sosialisasi Pengembangan Aplikasi |

| KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|---|--|---------|----------------|---------------|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16 | 03 | 2.02.10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 413.028.700 | - Penyediaan Layanan Multimedia Bogor Green Room Pimpinan Daerah selama 1 tahun - Pemeliharaan Perangkat Multimedia Bogor Green Room untuk 1 tahun |
| 2.16 | 03 | 2.02.12 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | Dokumen | 2 | 58.057.600 | Pendampingan Evaluasi SPBE 2024 |
| 2.20 | | | Urusan Statistik | | | | 267.165.500 | |
| 2.20 | 02 | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase ketersediaan data statistik sektora | % | 84 | 172.947.500 | |
| | | | | Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia | % | 3 | 94.218.000 | |
| 2.20 | 02 | 2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar | % | 84 | 71.344.000 | |
| | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan | % | 84 | 94.218.000 | |
| | | | | Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan, pengolahan data | Paket | 1 | 101.603.500 | |
| 2.20 | 02 | 2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | Dokumen | 1 | - | sub kegiatan difocusing |
| 2.20 | 02 | 2.01.02 | Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi | Orang | 131 | 71.344.000 | Sosialisasi Portal Data untuk 1 kegiatan dengan target 131 orang |
| 2.20 | 02 | 2.01.03 | Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun | Dokumen | 1 | 94.218.000 | Penyusunan Metadata Statistik Sektor 1 dan Sektor 2 (total 2 buku) |

| KODE URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (RP) | RINCIAN AKTIVITAS |
|---|----|---------|---|---|-----------|-------------------|------------------|--|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.20 | 02 | 2.01.05 | Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur | Jumlah infrastruktur statistik | Unit | 1 | 101.603.500 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Portal Data untuk 1 aplikasi |
| 2.21 | | | Urusan Persandian | | | | 105.655.100 | |
| 2.21 | 02 | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level | 2 | 105.655.100 | |
| 2.21 | 02 | 2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI | % | 83 | 105.655.100 | |
| | | | | jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi | Kebijakan | 1 | | |
| 2.21 | 02 | 2.01.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 1 | 105.655.100 | - Sosialisasi Keamanan Informasi untuk 150 orang - Lisensi Antivirus untuk 9 lisensi - Lisensi SSL untuk 1 lisensi - Lisensi Firewall untuk 1 lisensi |

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.